

**ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KAMPUNG TEMATIK  
HOME INDUSTRY DI KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG  
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG**

Raura Farrah El Ha, Herbasuki Nurcahyanto, Aufarul Marom

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1296

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*Law number 23 of 2014 provides for submission to local governments to take advantage of their potential in order to realize the welfare of their people. The Semarang City Government to increase economic growth, reduce poverty and unemployment has thematic village innovations as an effort to increase local potential, community empowerment, and settlement infrastructure. The purpose of this study is to analyze community empowerment through home industry thematic villages and the inhibiting factors. This research uses qualitative descriptive research. This research analyzes the stages of community empowerment through home industry thematic villages which consist of the awareness stage, the capacity stage, and the empowerment stage. The informant determination technique used in this research is snowball sampling with data collection methods through interviews, observation, and documentation. The results of the study show that community empowerment through home industry thematic villages has provided community understanding to map the potential and problems of the region even though it has not yet reached the level of empowerment and independence. The stages of community empowerment through home industry thematic villages have been in accordance with community empowerment both based on thematic village regulations and literature on community empowerment. The empowerment stage starts from the awareness stage, continues with the capacity stage and ends with the empowerment stage, but there are still some problems in each stage of the empowerment. Community empowerment through home industry thematic villages has inhibiting factors, including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. To overcome these problems, it is necessary to have regular monitoring and evaluation from the government to assist the implementation of community empowerment through home industry thematic villages so that problems and needs can be accommodated in accordance with the provisions of the Semarang mayor's regulation number 22 of 2018.*

**Keywords** : *Community empowerment; empowerment stages; thematic village*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki. UU Nomor 23 tahun 2014 menjadikan adanya penyerahan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, peningkatan pelayanan, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kota Semarang berdasarkan RPJMD 2016-2021 memiliki inovasi Gerbang Hebat (Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem dan Etos Bersama Masyarakat) salah satu programnya adalah kampung tematik. Kampung tematik merupakan upaya pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu peningkatan kualitas lingkungan rumah tinggal masyarakat miskin dan prasarana dasar permukiman dengan menonjolkan potensi atau ikon dari kampung tersebut. Masyarakat dapat meningkatkan dan menumbuhkan kreativitasnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Semarang dengan kampung tematik sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan sosial berdasarkan UU nomor 14 Tahun 2019 yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan individu mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Mardikanto dan Soebianto (2019: 100) menyebutkan pemberdayaan masyarakat adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan sehingga terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. Pemberdayaan berarti mendayagunakan masyarakat yang sebelumnya *powerless* menjadi *powerful*.

Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup pada salah satu kampung tematik yaitu kampung tematik *home industry* yang terbentuk pada tahun 2016 sebagai angkatan pertama. Kampung tematik *home industry*

terletak di RW 05 Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari. Kampung tematik ini dibentuk atas dasar banyaknya masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sebagai pelaku UMKM sehingga menjadi potensi yang ditonjolkan dan karakteristik wilayah sebagai kampung tematik. Kampung tematik *home industry* selama ini terkenal akan potensi usahanya di bidang tas rajut, lumpia, dan olahan makanan. Berdasarkan *pilot study* yang peneliti lakukan pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* memiliki kendala pada tiap tahapan pemberdayaan masyarakat. Beberapa fenomena yang ditemukan antara lain masyarakat tidak mengetahui pedoman dalam pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry*. Paguyuban yang belum terstruktur dan solid turut menjadikan tidak ada partisipasi dan pembahasan lebih lanjut dalam rangka pengembangan kampung tematik *home industry*. Pelaku ukm kampung tematik *home industry* turut menyebutkan bahwa memiliki kendala dalam hal pemasaran produk, bantuan modal usaha, serta adanya pendampingan sementara pihak pemerintah Kota Semarang telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat mengkomunikasikan kebutuhan yang dibutuhkan untuk nantinya dapat

disinergikan dengan kegiatan yang ada di Pemerintah daerah. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik *Home industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik *Home industry* Di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik *Home industry* Di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang?

## **C. Tujuan**

1. Mendeskripsikan dan Menganalisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik *Home industry* Di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang.
2. Mendeskripsikan dan Menganalisis Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik *Home industry* Di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang.

## **D. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1. Administrasi Publik**

Herbert A. Simon 1993 (dalam Pasolong, 2007: 2) mengemukakan bahwa administrasi yaitu kegiatan kelompok kerjasama agar terwujudnya tujuan kolektif. Kegiatan tersebut adalah pekerjaan yang terencana dan terstruktur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau sekelompok orang yang bekerjasama untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Syafi'i (dalam Pasolong, 2007: 6) menjelaskan publik ialah manusia yang mempunyai kebersamaan berfikir, perasaan, cita-cita, sikap dan tindakan yang benar menurut nilai norma yang mereka miliki. Nicholas Henry menetapkan batasan dalam memaknai administrasi publik, yaitu gabungan kompleks dari teori dan praktik yang bertujuan mengkomunikasikan pemahaman peran pemerintah dengan masyarakat sebagai publik. Sehingga kebijakan publik dapat berjalan secara responsif dan memenuhi kebutuhan sosial.

Berdasarkan uraian dari para ahli, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa administrasi publik ialah ilmu memahami hubungan pemerintah dengan publik yang bertujuan meningkatkan responsibilitas kebijakan serta

melembagakan praktik manajerial sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif, rasional dan efisien.

### **2. Manajemen Publik**

James A F Stoner (Handoko, 2008: 8) memaknai manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan upaya individu dalam organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuan yang ditentukan. Fungsi manajemen menurut George R. Terry meliputi *Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*. Manajemen publik adalah bagian dari administrasi publik yang didalamnya menjelaskan tentang desain program dan restrukturisasi organisasi, alokasi sumberdaya melalui sistem penganggaran, manajemen keuangan, manajemen sumberdaya manusia dan evaluasi program dan audit (Ott, Hyde & Shafritz dalam Wijaya, 2014). Dapat disimpulkan bahwa manajemen publik berkaitan dengan penggunaan fungsi-fungsi manajemen baik secara kelompok maupun individu dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Manajemen publik dalam penelitian ini berperan baik untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam upaya

memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya fokus manajemen publik salah satunya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat.

### **3. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan sosial berdasarkan UU nomor 14 Tahun 2019 yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan individu mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Maryani (2019) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan masyarakat berinisiatif untuk memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Mardikanto (dalam Maryani, 2019: 8) menyebutkan enam tujuan pemberdayaan masyarakat :

#### **1) Perbaikan Kelembagaan**

Perbaikan kelembagaan meliputi perbaikan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong partisipasi dari masyarakat dan berdampak pada fungsi dari kelembagaan tersebut. Lembaga yang baik memiliki visi, misi, tujuan yang jelas, sasaran yang dapat diukur, dan program kerja terarah. Anggota dari kelembagaan juga harus mengambil peran, saling memotivasi dan membagikan

kapasitas dan kemampuannya (waktu, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan).

#### **2) Perbaikan Usaha**

Perbaikan usaha yaitu mampu memberikan manfaat luas kepada masyarakat dengan memenuhi semua kebutuhan seluruh anggota yang bersangkutan. Perbaikan usaha ini merupakan kelanjutan dari perbaikan kelembagaan.

#### **3) Perbaikan Pendapatan**

Perbaikan bisnis akan berdampak pada peningkatan pendapatan anggota lembaga tersebut. Peningkatan pendapatan merupakan perbaikan pendapatan.

#### **4) Perbaikan Lingkungan**

Perbaikan lingkungan meliputi peningkatan kualitas lingkungan seperti penataan lingkungan kumuh, peningkatan penghijauan di lingkungan sekitar, dan memunculkan karakteristik kekhasan wilayah sebagai suatu potensi yang dapat dioptimalkan dan dimaksimalkan. Perbaikan lingkungan juga berimplikasi dari perbaikan pendapatan. Perbaikan pendapatan turut serta dalam hal memperbaiki lingkungan baik fisik maupun sosial karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh pendapatan yang terbatas atau kemiskinan.

#### 5) Perbaikan Kehidupan

Perbaikan kehidupan dapat dilihat melalui berbagai indikator seperti tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan masing-masing keluarga. Perbaikan kehidupan juga berimplikasi dari perbaikan pendapatan. Pendapatan yang membaik dapat memperbaiki keadaan keluarga atau masyarakat.

#### 6) Perbaikan Masyarakat

Perbaikan masyarakat adalah kehidupan yang lebih baik didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” sehingga terwujud kehidupan kelompok masyarakat yang lebih baik.

### **4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan dikatakan sebagai proses atau dapat juga dikatakan sebagai tahapan. Terdapat berbagai macam tahapan yang dapat dilakukan untuk menilai, menelaah pemberdayaan yang ada. Nina Mintarti dalam (Habibah, 2009: 18-19) mengemukakan tahapan pemberdayaan meliputi :

#### 1. Penyadaran

Tahap penyadaran yaitu pengenalan lingkungan dan potensi diri serta membantu komunitas untuk melihat keadaan dirinya dengan kekuatan domestik maupun global dalam

bentuk teknologi, informasi, budaya, politik hingga modal sosial.

#### 2. Pengorganisasian

Tahap dimana organisasi harus dari prakarsa rakyat secara sukarela serta diadakannya suatu program penguatan organisasi.

#### 3. Kaderisasi

Tahapan ini adalah organisasi menyiapkan kader-kader pengembangan keswadayaan lokal yang mengambil alih tugas, pendampingan setelah program berakhir. Kader terpilih secara partisipatif oleh masyarakat.

#### 4. Dukungan teknis

Tahap pemberdayaan dukungan teknis merupakan proses produksi untuk membantu dalam perbaikan teknologi maupun proses dari pemberdayaan saat sedang dilakukan.

#### 5. Pengelolaan Sistem

Pengelolaan sistem yaitu tahapan memperlancar masyarakat untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan baik secara individu maupun secara kelompok.

Tahapan pemberdayaan dijelaskan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:3-6) menjadi tiga tahapan pemberdayaan :

1. Tahap Penyadaran. Tahap ini merupakan tahap memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa mereka memiliki kemampuan dan hak memiliki yang perlu dibangun. Penyadaran dimulai dari diri mereka sendiri yang ingin untuk berdaya. Hal yang dilakukan adalah memberikan edukasi yang bersifat *belief*, *kognisi*, dan *healing*. Prinsip dasar tahapan ini adalah membuat masyarakat mengerti dan memahami bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses yang dilakukan berawal dari mereka sendiri.
2. Tahap pengkapasitasan. Tahap ini adalah tahap membentuk kemampuan. Pembentukan kemampuan dilakukan setelah masyarakat diberikan kesadaran melalui edukasi dan masyarakat paham dan siap menerima daya yang akan diberikan. Masyarakat diberikan daya sesuai dengan kemampuan individu atau kelompok sehingga dapat menerima daya atau kekuasaan yang diberikan.
3. Tahap Pendayaan. Tahap pendayaan merupakan tahap terakhir yaitu target diberi daya, kekuasaan dan otoritas bahkan peluang sesuai dengan

kemampuan serta memberikan akomodasi aspirasi dan dipandu untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil pelaksanaan pilihan sebelumnya.

## 5. Konsep Kampung Tematik

Pemerintah Kota Semarang berdasarkan inovasi RPJMD 2016-2021 memiliki inovasi Gerbang Hebat (Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran melalui Harmonisasi ekonomi, Edukasi, Ekosistem dan Etos Bersama Masyarakat) salah satu programnya adalah kampung Tematik. Kampung Tematik berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) No. 22 tahun 2018 adalah suatu wilayah di bawah administrasi kelurahan yang menunjukkan jatidiri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat. Kampung tematik merupakan upaya pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu peningkatan kualitas lingkungan rumah tinggal masyarakat miskin dan prasarana dasar permukiman dengan menonjolkan potensi atau ikon dari kampung tersebut. Perwal nomor 22 tahun 2018 Kota Semarang menyebutkan keluaran dan hasil dari

pelaksanaan kampung tematik. Hasil dari pelaksanaan kampung tematik meliputi :

- a. Terbentuknya kepribadian dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan
- b. Tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui perputaran ekonomi yang berbasis potensi lokal yang diangkat
- c. Terciptanya kualitas lingkungan permukiman yang lebih baik dan tertata, dengan terwujudnya.
  1. Jalan lingkungan yang baik
  2. Saluran air yang baik
  3. Sanitasi dan penghijauan yang baik

#### **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kampung tematik *home industry* Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *snowball*. Informan pada penelitian ini diantaranya Sub Koordinator Perencanaan Sosial Bappeda Kota Semarang, Kasi Pembangunan Kecamatan Candisari, Kasi Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan Karanganyar Gunung, Koordinator kampung tematik *home*

*industry*, Ketua RW 5 Kelurahan Karanganyar Gunung, dan masyarakat pelaku ukm. Jenis data berupa kata-kata hasil wawancara dengan informan, studi dokumen dan foto pendukung. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisis dan interpretasi data menggunakan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Kualitas atau keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Analisis Pemberdayaan Masyarakat melalui Kampung Tematik *Home Industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang**

###### **a. Tahap Penyadaran**

Tahap penyadaran merupakan tahap awal pada pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait kondisi lingkungan, bahwa mereka memiliki hak dan kemampuan sehingga perlu diberdayakan dan dibangun. Tahap penyadaran pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* pada penelitian ini dilihat dari penyadaran potensi dan permasalahan di wilayah dan sosialisasi mekanisme pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry*.

Pada aspek penyadaran potensi dan permasalahan di lingkungan wilayah diketahui bahwa kampung tematik merupakan sarana untuk mengetahui potensi dan masalah wilayah yang dapat diatasi dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry*. Tujuan dari program pemberdayaan telah tersampaikan kepada masyarakat dan masyarakat menyadari bahwa memiliki potensi untuk dapat diberdayakan melalui program kampung tematik *home industry*.

Pada aspek sosialisasi mekanisme dan prosedur kerja pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik diketahui pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* memiliki perwal no 22 tahun 2018 sebagai pedoman dan payung hukum. Program kampung tematik memiliki anggaran senilai Rp 200.000.000 dalam bentuk fisik dan non fisik dalam rangka mengatasi permasalahan wilayah dan meningkatkan potensi yang ada, serta dapat mengajukan melalui musrenbang dan dapat disinergikan dengan anggaran lain di perangkat daerah. Pada aspek ini diketahui bahwa pihak kecamatan, kelurahan, dan masyarakat belum mengerti dan mengetahui perwal nomor 22 tahun 2018 sebagai prosedur kerja dan payung hukum yang memberikan arah, maksud, dan tujuan bagi

kampung tematik. Ketidaktahuan *stakeholders* akan berpengaruh terhadap keberjalanan program kampung tematik *home industry* tidak optimal. Masyarakat perlu memahami bagaimana mekanisme dan prosedur kerja pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* karena program ini harus melibatkan masyarakat secara proaktif sehingga masyarakat dapat memahami kondisi lingkungan untuk menyesuaikan keberjalanan pemberdayaan dapat berjalan secara baik melalui program kampung tematik *home industry*.

## **b. Tahap Pengkapasitasan**

Tahap pengkapasitasan merupakan kegiatan untuk diberdayakan kecakapan dalam mengelola serta menggali kemampuan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* untuk lebih terampil dan mampu mengambil peluang. Kegiatan atau upaya tersebut dilihat dari pelaksanaan kampung tematik *home industry* yang terdiri dari pembentukan kampung tematik *home industry* dan penurunan anggaran.

Pada aspek pembentukan kampung tematik *home industry* diketahui terdiri dari Bappeda Kota Semarang, Kecamatan Candisari, Kelurahan Karanganyar Gunung dan masyarakat. Penyusunan proposal dalam

pembentukan kampung tematik merupakan bentuk awal pemberian daya kepada masyarakat untuk dapat memahami kondisi lingkungannya dan selanjutnya akan diberikannya daya dalam bentuk fisik dan non fisik senilai Rp 200.000.000. Adanya penyusunan strategi program dan rencana aksi dalam bentuk proposal kampung tematik *home industry* sudah sesuai dengan kaidah pemberdayaan yaitu terdapat pemetaan potensi serta permasalahan yang ada, namun partisipasi masyarakat dalam memetakan potensi serta permasalahan yang ada tersebut belum terakomodasi dengan baik. Masyarakat tidak dilibatkan secara *bottom up* untuk memetakan potensi dan permasalahan wilayahnya. Masyarakat tidak terlibat dalam penyusunan proposal kampung tematik *home industry*. Dahama dan Bhatnagar dalam (Mardikanto, 2019: 246) mengemukakan bahwa masyarakat adalah sumberdaya terbesar sehingga dalam perumusan program pemberdayaan harus sebesar-besarnya memanfaatkan potensi yang ada di dalam masyarakat sebagai penerima manfaat itu sendiri. Hal tersebut sekaligus berkaitan bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat sehingga apapun upaya pembangunan harus mampu untuk sebesar-besarnya menggali, mengembangkan dan

memanfaatkan potensi yang tersedia di masyarakat. Perumusan masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan harus melibatkan dan mau mendengarkan kepentingan semua pihak di dalam masyarakat. Dalam rangka menggerakkan semua pihak untuk terlibat aktif berpartisipasi penting adanya koordinasi yang baik.

Pada aspek penurunan anggaran yaitu terdapat masyarakat yang mengetahui berapa dana kampung tematik *home industry* yang mengucur serta dilaksanakan dalam pembangunan apa saja dan terdapat masyarakat yang tidak mengetahui terkait anggaran tersebut dan dialokasikan dalam pembangunan apa saja. Anggaran senilai Rp 200.000.000 dialokasikan sesuai dengan daftar usulan rencana pengembangan dan realisasi serta terdapat konsultan dan pengawas. Realisasi kampung tematik dianggarkan dalam bentuk jalan, saluran, gapura, tempat sampah, pot, lampu taman, tiang, instalasi, dan tanaman hias.

### **c. Tahap Pendayaan**

Tahap pendayaan merupakan tahap diberikannya peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Pada tahap ini masyarakat yang diberikan peluang sesuai kemampuan dan minat mereka merupakan upaya agar mereka

berpartisipasi aktif secara sukarela tanpa paksaan dan dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Tahap pendayaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* dilihat dari pengembangan kampung tematik *home industry* dan hasil dari pelaksanaan kampung tematik *home industry* yang dilihat dari segi sosial, ekonomi, dan infrastruktur.

Pada aspek pengembangan kampung tematik *home industry* yaitu telah mendapatkan pendampingan dari AIESEC sebagai CSR. Pendampingan ini diberikan kepada pelaku ukm bidang kuliner. Terdapat 6 pelaku ukm yang diberikan pendampingan, adanya kuota ini karena terbatasnya sumberdaya AIESEC. Masyarakat di kampung tematik *home industry* telah mengusulkan adanya pembangunan galeri sebagai tempat *display* dan pemasaran produk pelaku ukm kampung tematik *home industry*. Masyarakat juga mengetahui terkait pentahapan dan proses pembangunan galeri. Pembangunan galeri masih belum selesai karena terhalang adanya refocusing anggaran pandemi covid-19. Koordinator kampung tematik *home industry* menambahkan bahwa nantinya galeri tersebut akan digunakan sebagai tempat pemasaran atau display produk pelaku ukm di kampung tematik *home industry*. Hal ini juga sebagai upaya

untuk menarik para konsumen dan meningkatkan eksistensi kampung tematik *home industry*. Berdasarkan observasi lebih lanjut diketahui bahwa pemeliharaan sarana prasarana yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang melalui anggaran kampung tematik Rp 200.000.000 mengalami penurunan kualitas seperti cat gapura memudar, material gapura cuil, mural memudar, grill selokan yang sudah berkarat, serta taman ramah anak yang tidak difungsikan sebagaimana fungsinya. Ketua RW yang tidak memfasilitasi adanya paguyuban untuk secara bersama-sama membahas dan merembuk kegiatan yang ada dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry* berakibat pada pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana yang telah dibangun dari anggaran kampung tematik *home industry* senilai Rp 200.000.000 serta usulan di musrenbang kurang optimal. Koordinator kampung tematik *home industry* mengemukakan, bahwa :

“Kalau untuk berdaya kita kayaknya masih ketinggalan banyak. Sepengetahuan saya tematik itu harusnya maju, ini kami masih belum. Kami punya kampung tematik seharusnya bisa menghadirkan tamu, bisa mengundang tamu (untuk berwisata), lha bagaimana caranya paguyuban saja belum berjalan. Jadi kampung tematik ini mau dibawa

kemana masih bingung. Harusnya kan ada pembahasan seperti kita harus bagaimana, mau dibuat bagaimana. Jadi rembuk bareng itu belum ada” (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 13 Juni 2021)

Ketua RW sebagai pemimpin wilayah RW 5 seharusnya memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi untuk mau memotivasi dan menggerakkan masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dan berdaya. Tidak tergarapnya sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia dan kelembagaan atau paguyuban kampung tematik *home industry* menyebabkan tidak tumbuhnya inisiatif dan kemampuan baru untuk melaksanakan pembangunan lanjutan. Mardikanto (2019) mengemukakan bahwa tergarapnya sumber daya lokal (sumber daya alam, manusia, dan kelembagaan) yang ada akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat untuk berswakarsa dan berswadaya untuk melaksanakan pembangunan di masa depan. Adanya pengelompokan masyarakat yaitu paguyuban kampung tematik *home industry* yang terstruktur akan membangun kerjasama. (Ir. Hendra Hamid, 2018) mengemukakan bahwa melalui pengorganisasian masyarakat yang terstruktur dan efektif akan memudahkan perbaikan, perubahan, perumusan dan pemecahan masalah, serta

menjalin jejaring kemitraan agar memiliki posisi tawar yang kuat.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang lebih mendalam, masyarakat mengaku dalam pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry* memiliki kendala dalam hal pemasaran produk, bantuan modal, serta pelatihan dan pendampingan yang masif dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Berikut hasil wawancara dengan koordinator kampung tematik *home industry*, bahwa :

“Saya tidak tahu bahwa kampung tematik memiliki fasilitas pelatihan yang dapat disinkronisasikan dengan perangkat lain yang ada di kelurahan. Pelatihan di kelurahan itu dibagi ke 6 RW. Jadi hanya perwakilan. Materi pelatihan itu sesuai dengan pelaku ukm. Hanya saja untuk prakteknya yang susah karena kalau pelatihan setelah keluar ruangan ya lupa. Kami lebih butuh pendampingan jadi ada pemantauan gimana hasilnya dan dievaluasi” (Wawancara dengan koordinator kampung tematik *home industry* pada tanggal 24 Desember 2021)

Bappeda Kota Semarang menjelaskan bahwa adanya sinergi anggaran di perangkat daerah dengan fasilitasi kampung tematik *home industry* dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebaik mungkin dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Bappeda menegaskan

bahwa apa yang masyarakat butuhkan untuk tidak hanya berhenti sebagai wacana di tingkat masyarakat namun harus terkomunikasikan minimal sampai ke kelurahan. Apa yang dibutuhkan masyarakat selama dalam proses komunikasi itu semua bisa dicocokkan kegiatan yang ada untuk mendukung sehingga terjadi proses pemberdayaan yang baik. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subejo dan Narimo (dalam Mardikanto, 2019) bahwa proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja dalam rangka memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki dengan cara *collective action* dan *networking* sehingga masyarakat yang diberdayakan memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Fasilitas yang telah diberikan harus dimanfaatkan untuk membuat masyarakat berdaya, karena pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada program atau bantuan, akan tetapi membuat masyarakat memiliki keyakinan yang lebih besar akan kemampuan dirinya (Mulyawan, 2016:58).

Pada aspek tercapainya hasil dan keluaran dari pemberdayaan masyarakat

melalui kampung tematik *home industry* diketahui bahwa :

1. **Segi sosial** telah memberikan pengaruh positif kepada masyarakat di luar wilayah kampung tematik *home industry* yaitu RW 4 yang mengajukan wilayahnya sebagai kampung tematik lele, namun aspek sosial belum terbentuk pada masyarakat kampung tematik *home industry*. Kendala seperti kurangnya sifat kepemimpinan ketua RW 5 untuk memberikan motivasi dan mengarahkan masyarakat untuk terus berdaya melalui kampung tematik *home industry* memberikan dampak pada pencapaian hasil dan keluaran pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry*.
2. **Segi ekonomi** diketahui bahwa selama berjalannya kampung tematik *home industry* telah berdampak pada bertambahnya jumlah pelaku ukm dan meningkatkan pendapatan masyarakat walaupun sedikit hal ini karena kendala dalam hal pemasaran dan modal.
3. **Segi infrastruktur** diketahui bahwa terdapat perbaikan kualitas lingkungan fisik seperti pavingisasi jalan dan kawasan lebih tertata.

Penghijauan dan sanitasi di lingkungan kampung tematik *home industry* sudah menyeluruh dengan mensinergikan program lain seperti lomba taman toga.

## **2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kampung Tematik *Home Industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang**

### **a. Komunikasi**

Ketua RW yang menjabat saat pembentukan kampung tematik menyebutkan bahwa proposal kampung tematik *home industry* disosialisasikan dengan ketua RT di lingkungan RW 5 setelah proposal jadi. Masyarakat kurang mengerti isi dari proposal itu sendiri serta tidak mengetahui pedoman sebagai pegangan mereka untuk berjalan dalam pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry*. Komunikasi yang kurang antara masyarakat dengan Ketua RW menyebabkan usulan melalui musrenbang untuk mendukung potensi serta mengatasi masalah di kampung tematik *home industry* kurang efektif. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila aktor pembuat keputusan mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan tersebut dapat berjalan jika

komunikasi berjalan dengan baik, sehingga keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat (Handityasa & Purnaweni, 2020).

### **b. Sumber Daya**

Sumber daya di kampung tematik *home industry* sudah cukup baik namun masih menjadi faktor penghambat. Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Pelaksanaan dan pengembangannya terdapat CSR yaitu AIESEC yang memberikan pendampingan serta pelatihan kepada pelaku ukm hanya di bidang kuliner. Partisipasi dari masyarakat untuk hadir dalam pelatihan dan pertemuan dalam rangka membahas pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik dapat dikatakan rendah karena hanya beberapa yang turut hadir. Pada aspek anggaran diketahui bahwa kucuran dana senilai Rp 200.000.000 hanya dikucurkan sekali dan untuk perkembangan atau pemeliharaan kampung tematik *home industry* dapat menggunakan swadaya masyarakat namun kampung tematik *home industry* tidak memiliki swadaya masyarakat seperti kas untuk menunjang pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry*. Pada aspek sarana dan prasarana masih terbatas karena belum selesainya

pembangunan galeri sebagai kios *display* produk pelaku ukm dan belum adanya paguyuban yang berjalan secara solid menyebabkan pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry* kurang maksimal.

### **c. Disposisi**

Disposisi merupakan sikap atau karakteristik implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis dalam mengimplementasikan kebijakan. Pemangku kepentingan di wilayah seperti Ketua RW yang menjabat saat pembentukan kampung tematik *home industry*, Ketua RW yang menjabat saat ini, dan Ketua kampung tematik *home industry* belum memiliki disposisi yang baik. Ketua RW kurang memfasilitasi adanya pertemuan, rembuk bersama, dan penyampaian usulan-usulan sementara ketua kampung tematik *home industry* lebih fokus dalam forum kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimilikinya secara pribadi bukan pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik. Sejauh ini dalam pelaksanaannya masyarakat mengemukakan bahwa hanya koordinator kampung tematik *home industry* yang menggerakkan masyarakat untuk terus berdaya melalui kampung tematik *home industry* seperti memberi info terkait

pelatihan dari kelurahan, adanya bazar, adanya monitoring, dan lain sebagainya.

### **d. Struktur Birokrasi**

Ketidaktahuan pemangku kepentingan terhadap perwal nomor 22 tahun 2018 dan proposal kampung tematik *home industry* menyebabkan kebingungan dalam keberjalanan kampung tematik *home industry* untuk dibawa kemana karena tidak mempunyai pegangan atau pedoman. Sementara perwal nomor 22 tahun 2018 disebutkan apa saja tujuan dari pelaksanaan kampung tematik, keluaran dari pelaksanaan, hasil dari pelaksanaan, tahapan pembentukan kampung tematik, serta bagaimana pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat diakses menggunakan fasilitasi anggaran lain yang ada di Perangkat Daerah. Gagasan-gagasan dalam rangka pemecahan masalah serta pengangkatan potensi wilayah tidak terakomodasi dengan baik karena pihak kecamatan, kelurahan, dan masyarakat tidak mengerti arah, maksud, dan tujuan dari program tersebut secara rinci sehingga penyampaian secara *bottom up* tidak tercapai secara optimal.

## **KESIMPULAN**

Pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* telah

memberikan pemahaman masyarakat untuk memetakan potensi dan permasalahan wilayahnya walaupun belum mencapai tingkat keberdayaan dan kemandirian. Tahapan pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* telah sesuai dengan pemberdayaan masyarakat baik berdasarkan regulasi kampung tematik maupun literature mengenai pemberdayaan masyarakat. Tahapan pemberdayaan dimulai dari tahap penyadaran, dilanjutkan tahap pengkapasitasan dan diakhiri dengan tahap pendayaan, akan tetapi masih terdapat beberapa masalah dalam setiap tahapan pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* memiliki faktor penghambat antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## **SARAN**

1. Perlu adanya sosialisasi kembali dan pendampingan terkait arah dan mekanisme pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Semarang nomor 22 tahun 2018.
2. Perlunya pembentukan paguyuban kampung tematik *home industry* yang memiliki struktur organisasi dengan visi dan misi yang jelas, adanya penunjukan

personalia dengan *job description* yang tepat, serta terdapat agenda untuk membahas pengembangan kampung tematik *home industry*.

3. Perlunya dilakukan pelatihan motivasi dan kepemimpinan kepada pengurus kampung tematik *home industry* untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta perlu pendampingan yang intensif dari organisasi perangkat daerah terkait.

4. Perlunya mengedukasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, menginformasikan tentang kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, dan menunjukkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi seperti memberikan informasi dengan jelas tentang manfaat apa yang akan mereka peroleh secara langsung dan tidak langsung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Habibah, S. (2009). Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Wirausaha Daur Ulang Sampah Kering di Kelurahan Pasar Minggu. *Dakwah dan Komunikasi*.
- Handityasa, O., & Purnaweni, H. (2020). Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Izin Usaha Toko Modern Minimarket Waralaba Cabang di Kecamatan Depok terkait Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*,

3(18), 12–26.

Handoko, T. H. (2008). *Manajemen*. BPF-Yogyakarta.

Ir. Hendra Hamid, M. S. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca* (Vol. 1, Issue 1).

Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Maryani, Dedeh., & Nainggolan, Ruth Roselin E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman: Deepublish.

Mulyawan, Rahman. (2016). *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*. Bandung: UnpadPress.

Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.

Wijaya, A. F. (2014). *Manajemen Publik: Teori dan Praktik*. UB Press.

**Dokumen-Dokumen :**

Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 22 tahun 2018

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019